



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRAYITNO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 760692

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.260.000.000**

1. Tanah Seluas 114 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 428 m2/224 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 1.690.000.000
3. Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 454 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah Seluas 1.340 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 1.200.000.000
6. Tanah Seluas 351 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
8. Tanah Seluas 569 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
9. Tanah Seluas 371 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	54.500.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
3.000.000		
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 1995, HASIL SENDIRI	Rp.	
1.500.000		
3. MOBIL, VOLKSWAGEN COMBI 1600/MINI BUS Tahun 1974,		
HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.359.500.000
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.209.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.